

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	35
1.3. Tujuan Penelitian.....	35
1.4. Manfaat Penelitian.....	36
1.5. Orisinalitas /Keaslian Penulisan.....	37
1.6. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	46
2.1 Landasan Teori.....	46
2.1.1 Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch.....	49
2.1.1.1. Keadilan.....	50
2.1.1.2. Kepastian.....	55
2.1.1.3. Kemanfaatan.....	58
2.1.2. Teori Perjanjian.....	60
2.1.2.1. Unsur-Unsur Perjanjian.....	66
2.1.2.2. Asas-Asas Perjanjian.....	68
2.1.2.3. Saat Lahirnya Perjanjian.....	71
2.1.2.4. Bagian-bagian Perjanjian	73

2.1.3. Teori Badan Hukum.....	75
2.2. Landasan Konseptual.....	85
2.2.1. Penafsiran.....	86
2.2.2. Persekutuan Modal.....	98
2.2.3. Perjanjian Pemisahan Harta.....	100
2.2.4. Harta Bersama.....	109
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	115
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	115
3.2. Pendekatan Penelitian.....	119
3.3. Bahan Hukum.....	121
3.4. Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data.....	124
3.5. Pengolahan dan Analisa Data.....	125
BAB IV	
PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	128
4.1. Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta Di Indonesia.....	128
4.1.1. Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta.....	128
4.1.2. Pengaturan Mengenai Saham Suami-Istri Dalam Perseroan Terbatas dan Prinsip Satu Saham Satu Suara.....	140
4.1.3. Kepastian Hukum Terhadap Status Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri.....	153
4.2. Implementasi Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta Di Indonesia	159
4.2.1. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.....	159
4.2.2. Status Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta.....	172
4.2.3. Penyetoran Saham Dalam Praktek Pendirian Perseroan Terbatas.	176

4.2.3.1. Penyetoran Saham Yang Bersumber Dari Harta Pribadi..	182
4.2.3.2. Penyetoran Saham Yang Bersumber Dari Harta Bersama	190
4.2.4. Pengakuan Hak Suara Suami-Istri Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	203
4.2.5. Potensi Masalah Dalam Pengalihan Hak Atas Saham Oleh Suami-Istri.....	206
4.2.6. Konfirmasi Status Saham Dalam Pembagian Dividen.....	222
4.2.7. Kewajiban Pembayaran Pajak.....	227
4.2.8. Kepailitan.....	242
4.3. Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta Yang Berkepastian Hukum.....	246
4.3.1. Kebutuhan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta.....	246
4.3.2. Harmonisasi Norma Regulasi Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pemisahan Harta.....	255
4.3.2.1. Norma Pengaturan Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	255
4.3.2.2. Norma Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	259
4.3.2.3. Norma Pengaturan Hak Milik Kebendaan (Saham) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	261
4.3.3. Konsepsi Penyempurnaan Norma Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	271
4.3.3.1. Pendirian Perseroan Terbatas.	272
4.3.3.2. Sumber Dana Penyetoran Saham.....	276
4.3.3.3. Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	280
4.3.3.4. Pembagian Dividen.	289
4.3.4. Langkah-Langkah Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	292

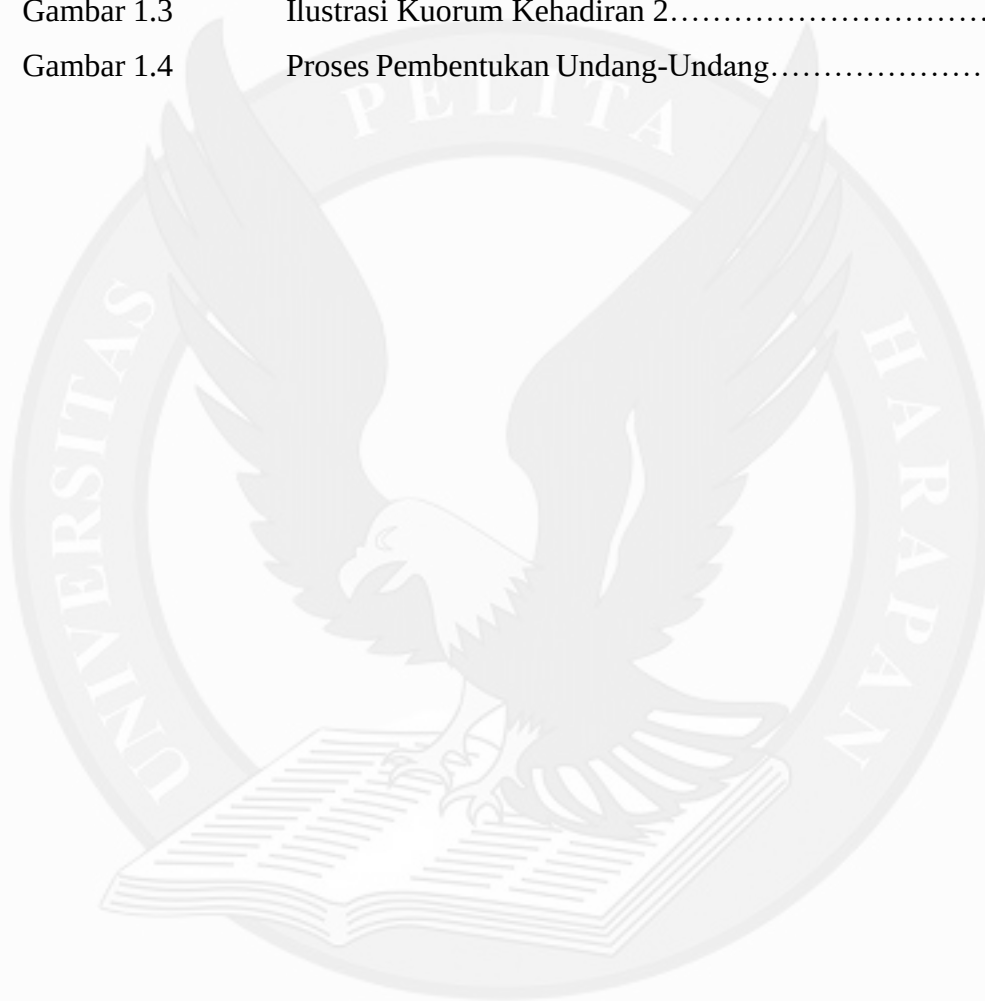
4.3.4.1. Penyusunan Naskah Akademik Oleh BPHN Kementerian Hukum.....	292
4.3.4.2. Usulan Prakarsa Kepada Presiden Republik Indonesia...	303
4.3.4.3. Penyusunan Naskah Rancangan Undang-Undang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	273 309
4.3.4.4. Penyampaian Rancangan Undang-Undang Kepada Dewan Perwakilan Rakyat.....	273 316
4.3.4.5. Dengar Pendapat Dan Konsultasi Dengan Organisasi Profesi, Organisasi Pelaku Usaha Dan Para Ahli.....	323

BAB V

PENUTUP	328
5.1. Simpulan	328
5.2. Saran.....	331
DAFTAR PUSTAKA	333
RIWAYAT HIDUP	346

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ilustrasi Susunan Pemegang Saham.....	146
Gambar 1.2	Ilustrasi Kuorum Kehadiran 1.....	151
Gambar 1.3	Ilustrasi Kuorum Kehadiran 2.....	152
Gambar 1.4	Proses Pembentukan Undang-Undang.....	327



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kuorum Dalam RUPS.....	287
Tabel 1.2	RUU Yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas 2024	320

